



LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA **PT. SERTIFIKASI PERUSAHAAN INDONESIA**

Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Sifat Usaha	: Spesial
Klasifikasi	: SPESIALIS (Konstruksi Khusus)
Kode Subklasifikasi	: KK013
Kode KBLI	: 43909
Deskripsi KBLI	: KONSTRUKSI STRUKTUR BETON PASCATARIK (Post Tensioned)
Ruang Lingkup	: Kelompok Ini Mencakup Pekerjaan Konstruksi Beton Pascatarik (post Tensioned) Untuk Struktur Beton Pracetak Dengan Cor Di Tempat Untuk Bangunan Gedung Dan/ atau Bangunan Sipil.

KP BUJKA		
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan	
Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.
Peralatan Utama	Paling sedikit 5 alat alat berat konstruksi, cutter section dredger (CSD), derrick barge (DB), diesel hammer, forklift, formwork pier head, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, jet cleaner, jet water pump, kapal keruk, ponton material supply, shotcrete pump, sliding formwork, suction dredger, utility boat,	
Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyipuan, atau surat	

	pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun.
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK

BUJKN		
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan	
Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000.-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.
Peralatan Utama	Paling sedikit 2 alat alat berat konstruksi, cutter section dredger (CSD), derrick barge (DB), diesel hammer, forklift, formwork pier head, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, jet cleaner, jet water pump, kapal keruk, ponton material supply, shotcrete pump, sliding formwork, suction dredger, utility boat,	
Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun.	
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK	

PMA		
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan	
Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)

	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNIP paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNIP paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan
Peralatan Utama	Paling sedikit 2 alat alat berat konstruksi, cutter section dredger (CSD), derrick barge (DB), diesel hammer, forklift, formwork pier head, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, jet cleaner, jet water pump, kapal keruk, ponton material supply, shotcrete pump, sliding formwork, suction dredger, utility boat,	
Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun.	
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK	